

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai strategi komunikasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar (Dishubkominfo Kab. Banjar) dalam memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai komponen strategi komunikasi internal dan eksternal yang dikembangkan dan digunakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar untuk meyakinkan pihak internal dan eksternal agar dapat bersama sama berpartisipasi aktif dalam upaya mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha. Pihak internal yang dimaksud adalah internal organisasi Dishubkominfo Kab. Banjar dan pihak eksternal yang dimaksud adalah organisasi eksternal dan masyarakat umum, serta pengguna jalan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sendiri adalah sebuah organisasi yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Banjar, hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3). Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang

memiliki tujuan yang sama, dan organisasi merupakan sebuah sistem yang bergerak, yang antara satu bagian dan bagian lainnya saling mempengaruhi. Sebagaimana menurut Schein dalam Muhammad (2011:23) organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Senada dengan definisi tersebut, Senjaya dkk (2007:4.4) menyebutkan bahwa organisasi merupakan satu kumpulan atau sistem individual yang melalui satu hierarki jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi juga mensyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas, seperti pimpinan dan karyawan.

Partisipasi Dishubkominfo Kab. Banjar dalam mendapatkan penghargaan WTN 2014 adalah merupakan yang pertama kalinya apalagi karena memang harus diakui selama ini situasi transportasi di kabupaten ini, sangat jauh dari harapan(<http://dishubkominfo.banjarkab.go.id/selangkah-lagi-kab-banjar-raih-wtn/>) dan ini juga merupakan penghargaan pertama pula yang diterima dalam bidang perhubungan tingkat nasional sejak organisasi ini berada di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

Karena sejak berganti nama menjadi Dishubkominfo Kab. Banjar tahun 2009, organisasi ini belum pernah sekalipun mengikuti kegiatan yang merupakan program dari Pemerintah Pusat ini. Padahal pada tahun 2014 di bulan Januari baru dilakukan pergantian pucuk pimpinan organisasi yaitu Kepala Dinas, demikian pula dengan kepala bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

dengan lalu lintas ini baru dilantik pada Agustus 2013, sedangkan proses penilaian WTN sudah dimulai bulan Maret sampai April 2014. Artinya dua orang penting dalam manajemen organisasi ini belum menjabat lebih dari satu tahun, apalagi mengingat kedua orang tersebut belum pernah bergabung dengan Dishubkominfo Kab. Banjar sebelumnya.

Tidak adanya *basic* kompetensi teknis bidang perhubungan yang dimiliki baik dari pendidikan maupun pengalaman, tentunya membuat organisasi ini menarik untuk diteliti. Meskipun dapat dipastikan kondisi Dishubkominfo pada saat itu sedikit banyak juga merupakan sumbangsih manajemen kepemimpinan yang sebelumnya, akan tetapi keberanian dan keberhasilan organisasi dalam mengarungi proses penilaian tentu layak menjadi perhatian.

Untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan, serta untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi perkotaan, pemerintah memberikan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya dalam meningkatkan penyelenggaraan kinerja sistem transportasi perkotaan dalam tercipta sistem lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, aman efisien, berkelanjutan dan menjamin ekuitas hak pengguna.

Selain itu pemberian penghargaan juga bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi di kawasan perkotaan yang handal, berkelanjutan dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan serta peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas, sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas (Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Km 5 Tahun 2010,

tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha). Sehingga dapat dikatakan bicara mengenai WTN tidak lain adalah sama dengan bicara tentang terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

Karena keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi, *SEE (Safety and Security, Efficiency dan Equity)*. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Secara nasional, kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 % dari total PDB Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, keselamatan jalan sudah sewajarnya menjadi prioritas nasional yang mendesak untuk segera diperbaiki. Permasalahan keselamatan jalan tidak hanya dihadapi dalam skala nasional saja, tetapi juga menjadi masalah global. Setiap tahun, terdapat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, atau lebih dari 3.000 jiwa per harinya. Jika tidak ada langkah-langkah penanganan yang segera dan efektif, diperkirakan korban kecelakaan akan meningkat dua kali lipat setiap tahunnya.

Hal tersebut berdasarkan apa yang tercantum dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035, ini merupakan sebuah dokumen yang disusun berdasarkan amanat Pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009, sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan. Penyusunan RUNK Jalan bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pemangku kebijakan agar dapat merencanakan dan melaksanakan penanganan keselamatan jalan secara terkoordinir dan selaras. (Dokumen RUNK Jalan 2011-2035:[hubdat.dephub.go.id](http://hubdat.dephub.go.id))

Maka dari itu berbicara penghargaan WTN (Wahana Tata Nugraha) sama dengan berbicara mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas. Penghargaan WTN ini merupakan salah satu penghargaan yang sangat berarti baik untuk Pemerintah Kabupaten Banjar dan khususnya bagi Dishubkominfo Kab. Banjar.

Pertama, WTN ini menjadi salah satu indikator terlaksananya visi dan misi Dishubkominfo Kab. Banjar yang terkait perhubungan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Misi yang terkait perhubungan, mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi yang tertib, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dan mewujudkan kinerja pelayanan sektor transportasi yang handal. Selain itu juga untuk menunjukkan bahwa kabupaten ini sudah memiliki perencanaan dan sistem lalu lintas yang berstandar nasional.

Kedua, hadiah yang diperoleh berupa 1 (satu) buah bus angkutan sekolah/perintis dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai 1 (satu) milyar tentu akan sangat berarti bagi masyarakat. Karena untuk DAK akan dapat digunakan untuk memperbaiki dan membangun sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik lagi, demi terciptanya budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas. Hal ini seperti yang disebutkan dalam website resmi Dishubkominfo Kab. Banjar ([dishubkominfo.banjarkab.go.id](http://dishubkominfo.banjarkab.go.id)).

WTN juga adalah pintu masuk bagi daerah (Propinsi, Kabupaten atau Kota) untuk bisa mendapatkan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan, atau dengan kata lain merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Hal ini tentu sesuai dengan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (delapan) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : Km 5 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang berbunyi “kota-kota penerima penghargaan piala Wahana Tata Nugraha dapat diberikan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.” Semua itu tentunya dilakukan untuk masyarakat Kabupaten Banjar secara khusus dan pengguna fasilitas transportasi dan perhubungan secara umum. Sekaligus sebagai amanat perundang-undangan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dalam bentuk upaya menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjar.

Kemudian upaya untuk dapat menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjar ini akan membuat penelitian ini semakin menarik, karena data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyebutkan data kecelakaan lalu lintas menurun sebanyak 14 kasus dari tahun 2012 ke 2013, tetapi angka ini masih tetap membuat Kab. Banjar menduduki peringkat ke 1 (pertama) kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalsel dengan 149 kasus. Dibandingkan dengan Kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru sebagai Ibukota Propinsi yang hanya tercatat 67 dan 108 kasus, serta Kab. Tabalong yang juga mendapatkan WTN tercatat 102 kasus ditahun 2013 dan Kab. Kotabaru yang merupakan Kabupaten dengan wilayah terluas tercatat 31

kasus di tahun 2013, Kab. Banjar termasuk wilayah yang paling rawan kecelakaan di Kalsel.

Sedangkan untuk data pelanggaran lalu lintas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar 1961 kasus, dari tahun 2012 sebanyak 5239 menjadi 3278 kasus pada tahun 2013 dan untuk peringkat juga menurun dari peringkat ke 2 menjadi peringkat 4 se Kalsel. Dibandingkan dengan kota Banjarmasin yang masih menduduki peringkat tertinggi pelanggaran lalu lintas dengan 8885 kasus dan Kota Banjarbaru 2245 kasus, serta Kab. Kotabaru 1846 kasus, Kab. Banjar juga terhitung masih rawan pelanggaran lalu lintas dilihat dari jumlah pelanggaran yang terjadi. Karena secara umum pada tahun tersebut memang mayoritas Kab/Kota di Kalsel mengalami penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. (Kalsel Dalam Angka 2014, [www.bps.co.id](http://www.bps.co.id))

Posisi Kab. Banjar untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak berubah tentu akan menimbulkan pertanyaan terkait pelaksanaan dan penerimaan penghargaan WTN ini, apakah tujuan seperti ini saja yang diharapkan atau seharusnya sebagai penerima WTN harus jauh lebih baik. Padahal kasus-kasus ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kondisi nyata diterimanya WTN, sehingga WTN benar-benar dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan sistem transportasi dan lalu lintas yang baik dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Penilaian WTN memang hanya dilakukan di daerah perkotaan, dan tentu belum mencerminkan keberhasilan Dishubkominfo Kab. Banjar dalam melaksanakan visi dan misinya, selain itu tentu akan menjadi keadaan yang sangat ironis apabila daerah penerima penghargaan WTN memiliki jumlah kasus



kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tertinggi. Apalagi kalau partisipasi dalam kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai stimulus wilayah diluar perkotaan.

Selain itu, keunggulan dan strategisnya wilayah Kab. Banjar menjadikan penelitian ini juga penting untuk diteliti. Keunggulan yang dimiliki yaitu dengan ditetapkannya Dishubkominfo Kab. Banjar sebagai pengelola terminal Gambut Km.17, yang merupakan satu-satunya terminal yang memiliki Tipe A di Kalsel.

Sedangkan strategisnya Kabupaten Banjar adalah :

- Kabupaten Banjar sebagai trans Kalimantan
  - Kabupaten Banjar sebagai penyangga kota Banjarmasin
  - Kabupaten Banjar dekat dengan rencana pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan (Kota Banjarbaru)
  - Kabupaten Banjar dekat dengan *Airport* (lapangan udara) Banjarbaru dan Pelabuhan (Banjarmasin)
  - Masuk bagian rencana pemerintah Provinsi bagian dari rencana kota Metropolitan “*Banjar Bakula* (Banjar Bersaudara)” (Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura/)
- (<http://id3.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>)

Untuk itu wilayah Kab. Banjar dengan letak geografisnya yang strategis dapat menjadi poros transportasi dan perhubungan seluruh Kab/Kota di propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis letaknya berada di tengah dan berbatasan langsung dengan 8 dari 13 Kab/Kota di yang ada di Kalimantan Selatan.



Gambar 1.1 PETA KABUPATEN BANJAR

Sumber : (<http://id3.banjarkab.go.id/profil-2/gambaran-umum-wilayah-kab-banjar/>)



Batas-batas yang Kabupaten Banjar adalah :

- Sebelah Utara dengan HSS & Tapin
- Sebelah Selatan dengan Banjarbaru & Tanah Laut
- Sebelah Timur dengan Kotabaru & Tanah Bumbu
- Sebelah Barat dengan Batola & Banjarmasin

Untuk mendapatkan penghargaan WTN ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dishubkominfo Kab. Banjar, ini berdasarkan uraian objek penilaian pembobotan penilaian WTN dan dokumen RUNK jalan sebagaimana disebut diatas. Hal ini juga senada dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan banyak disebutkan mengenai koordinasi antar instansi terkait dengan LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) ini. Sehingga pasti akan ada organisasi atau pihak yang akan terkait dalam penghargaan ini selain Dishubkominfo Kab. Banjar. Uraian yang dimaksud adalah, pendanaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, angkutan, prasarana, lingkungan, pembinaan daerah yang berupa perhatian dan peran daerah dalam bidang transportasi khususnya mengenai keamanan dan keselamatan jalan, serta tingkat kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar dalam ekspose penilaian tahap ke tiga, yaitu Bupati, Sekertaris Daerah dan jajarannya.

Tujuan diikutinya lomba ini seharusnya yang utama adalah untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi amanat perundang-undangan yang intinya adalah keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dan juga mewujudkan apa yang menjadi visi Dishubkominfo Kab. Banjar yaitu untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, serta misi Dishubkominfo Kab. Banjar diantaranya yaitu, mewujudkan keselamatan dan keamanan transportasi yang tertib, aman, nyaman dan berwawasan lingkungan. Keamanan dan keselamatan lalu lintas adalah yang

paling utama diperhatikan dalam memberikan pelayanan transportasi dan perhubungan, sehingga perlu ada perencanaan dan pengaturan untuk mewujudkannya.

Meskipun pada akhirnya melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP 747 Tahun 2014, tertanggal 4 September 2014 Tentang Kota/Kabupaten dan Propinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2014 pada Lampiran II, Kota Martapura Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas untuk kategori kota sedang. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mendapatkan penghargaan ini mudah diperoleh, karena panjang dan banyaknya proses yang harus dilewati dan diperlukannya strategi komunikasi tentunya untuk dapat melewati semua tahapan-tahapan yang telah dilalui yang kemudian perlu dilihat komponen-komponen strategi komunikasi yang dikembangkan dan digunakan.

Panjang karena sejak penilaian administrasi sekitar bulan April 2014, penerima penghargaan baru diketahui sekitar bulan september 2014 atau sekitar 6 (enam) bulanan. Banyak proses karena penilaian dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian pertama (P1) administrasi, penilaian kedua (P2) administrasi tahap kedua dan survey dan penilaian ketiga (P3) pembinaan daerah dan tingkat kehadiran pimpinan daerah serta jajaran terkait. Oleh karenanya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, komunikasi efektif antar pihak-pihak yang terkait perlu dijalin dengan baik. Agar pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal Dishubkominfo Kab. Banjar benar-benar dapat diyakinkan untuk turut berperan serta aktif, untuk itulah diperlukan strategi komunikasi.

Karena upaya tersebut merupakan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hallahan *et al.* mendefinisikan strategi komunikasi sebagai "penggunaan tujuan komunikasi oleh organisasi untuk memenuhi misinya". Sedangkan menurut Hawamdeh ada tiga komponen penting dalam strategi komunikasi: (1) *stakeholder* (pemangku kepentingan); (2) pesan perubahan; dan (3) saluran untuk menyampaikan pesan. (Poentarie, 2013:165)

Strategi komunikasi dilakukan dengan membangun komunikasi internal dengan menjadikan kegiatan ini motivasi bagi organisasi untuk bisa mendapatkan penghargaan bergengsi pertamanya. Komunikasi dilaksanakan hingga semua anggota organisasi mengerti dan memahami, kemudian bertindak aktif termotivasi untuk melaksanakan perannya masing-masing. Secara umum strategi ini dapat dilihat dari diantaranya melalui pemanfaatan Apel Pagi untuk komunikasi langsung atau tatap muka secara formal, dan secara informal oleh para kapid setelah pelaksanaan Apel Pagi. Strategi tersebut dipilih agar semua anggota organisasi mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup sesuai dengan kebutuhannya, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat lebih terarah dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi, serta untuk menghindari distorsi pesan akibat penyampaian berjenjang maupun karena lokasi yang berbeda.

Sedangkan strategi komunikasi eksternal diantaranya dilakukan dengan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, hal tersebut dilakukan agar nantinya bisa mendapatkan dukungan Kepala Daerah dan jika Kepala Daerah mendukung tentunya dapat diturunkan menjadi instruksi untuk berpartisipasi aktif mensukseskan kegiatan ini secara umum bagi seluruh jajaran Pemerintah Kab. Banjar dan secara khusus bagi SKPD terkait.

Puncak dari hasil strategi komunikasi eksternal adalah yaitu dukungan nyata berupa kehadiran Bupati beserta istri dan sekda serta jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar pada saat penyambutan kedatangan tim penilai dan pemaparan atau ekspose atas penilaian yang sudah dilakukan (<http://dishubkominfo.banjarkab.go.id/selangkah-lagi-kab-banjar-raih-wtn/>).

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tiap organisasi harus bisa memaksimalkan peran yang dimiliki oleh tiap individu yang berada dalam sebuah organisasi, khususnya yang memiliki kedudukan sebagai pimpinan. Seorang pimpinan organisasi memiliki peran yang sangat vital dan strategis, karena vitalnya Courtois dalam Soekarso, (2010:10) mengatakan bahwa kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa kepala, mudah menjadi sesat, panik, kacau dan anarki. Senada dengan Courtois, bahwa organisasi tanpa pemimpin bagaikan kapal tanpa nahkoda. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi dan misi terhadap masa depan, mengorganisir orang dan mengelola pembaharuan dan perubahan (Soekarso, 2010:10). Oleh karena itu peran dari pimpinan dan manajemen Dishubkominfo Kab. Banjar merupakan bagian integral organisasi untuk merencanakan dan mengatur strategi kegiatan ini.

Penelitian ini berada pada lingkup komunikasi organisasi, seperti pada uraian sebelumnya yang terkait komunikasi di internal anggota organisasi, juga komunikasi antara organisasi Dishubkominfo Kab. Banjar dengan eksternal organisasi. Dalam proses awal persiapan pendaftaran hingga diterimanya penghargaan, terdapat problematika yang timbul, baik di internal maupun yang terjadi di eksternal Dishubkominfo Kab. Banjar. Ini menunjukkan adanya dinamika dalam organisasi, karena dinamika dalam organisasi adalah sebuah

karakteristik. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad (2011:29) karakteristik organisasi diantaranya yaitu bersifat dinamis, maksudnya organisasi sebagai sebuah sistem terbuka terus menerus mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungan yang selalu berubah tersebut. Karakteristik lain yaitu, memerlukan informasi (semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup, tanpa informasi organisasi tidak dapat jalan dan tanpa informasi organisasi akan macet atau mati), mempunyai tujuan (organisasi merupakan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu) dan terstruktur (organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan, biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisasi). Meskipun demikian adanya problematika tersebut harus segera diatasi demi tercapainya tujuan organisasi.

Dalam internal organisasi diantaranya adalah adanya komunikasi yang kurang baik antar bidang dalam Dishubkominfo Kab. Banjar, yang kemungkinan disebabkan ada perbedaan tingkat kompetensi teknis. Karena kompetensi yang dimiliki akan dapat membuat SDM paham dengan perencanaan-perencanaan program dan kegiatan teknis transportasi dan perhubungan, sehingga lebih aktif dan kreatif dalam berkomunikasi, serta melakukan dukungan.

Untuk dapat memperoleh penghargaan ini Dishubkominfo Kab. Banjar tidak hanya memerlukan komunikasi internal yang baik dalam organisasi, tetapi juga dengan eksternal organisasi sebagaimana disebut di atas. Adanya rangsangan untuk menunjukkan eksistensi kepemimpinan yang terbaik agar mendapatkan penghargaan, akan mungkin dapat menguatkan ego sektoral dan menimbulkan iklim kompetisi. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dasar yang diinginkan manusia,

yang menurut Abraham Maslow diantaranya ada kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri (Liliweri, 2004:201).

Sebagaimana juga menurut Mulyana (2004:221) bahwa memang lingkungan fisik tempat orang-orang hidup mempengaruhi perilaku mereka, termasuk perilaku komunikasi. Melihat orang lain mendapatkan penghargaan akan dapat membuat orang termotivasi mendapatkan hal yang sama, motivasi seperti ini apabila tidak menjadi perhatian dapat berpotensi menghambat tercapainya tujuan.

Sehingga sangat diperlukan komunikasi yang efektif untuk dapat mengelola dan meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak sampai menjadi konflik, karena komunikasi sendiri adalah bagian daripada strategi komunikasi, dan berbicara strategi komunikasi tidak akan lepas dari tujuan yang ingin dicapai dan jenis materil apa saja yang kita pandang dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan ini, karena syarat untuk merumuskan strategi adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang tujuan (Liliweri, 2011:239).

Mengenai pentingnya komunikasi sendiri telah banyak dibahas oleh banyak tokoh dalam bidang komunikasi, diantaranya oleh Chester Barnard yang menulis bahwa fungsi eksekutif pertama adalah mengembangkan dan memelihara sistem komunikasi dan tulisan ini didukung oleh beberapa penelitian lain yaitu oleh Lull., et al, Zelko dan Dance, serta survei Universitas Michigan yang menyatakan adanya hubungan yang pasti antara komunikasi dan produktifitas pekerja, serta pentingnya komunikasi untuk mencapai sukses organisasional (Tubbs dan Moss, 2001:167-168). Dalam lingkup keseharian, komunikasi adalah hal mendasar dalam kehidupan kita, komunikasi bisa jadi akan mempengaruhi

karir seseorang, karena komunikasi itu penting untuk efektifitas kerja (Ruben & Stewart, 2013:3,4,5). Bahkan menurut Moerdijati (2012:15) bahwa manusia dalam kehidupannya tidak pernah bisa melepaskan diri dari komunikasi.

Untuk mendapatkan kinerja organisasi yang efektif, akan bergantung pada kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan dalam menjalankan perannya, khususnya kemampuan berkomunikasi. Dimana pimpinan harus memiliki rencana dan strategi yang dapat dikomunikasikan dengan para anggotanya, sebagaimana disebut dalam teori sumber daya kognitif Fiedler dan Garcia dalam Rivai (2008:21), adalah suatu kepemimpinan yang menyatakan bahwa seorang pimpinan memperoleh kinerja kelompok yang efektif dengan pertama-tama membuat rencana keputusan dan strategi yang efektif, dan kemudian mengkomunikasikannya lewat perilaku pengarah direktif.

Jadi untuk dapat melihat fokus dalam pembentukan komponen strategi komunikasi dalam organisasi, maka yang akan diamati adalah orang-orang dalam organisasi yang memiliki kewenangan. Kewenangan dalam organisasi hanya dimiliki oleh pejabat organisasi, dalam hal ini adalah *top manager* atau kepala dinas dan *middle manager* atau kepala bidang. Karena orang-orang ini yang akan mengarahkan apa yang akan dilakukan organisasi ini dan mau dibawa kemana organisasi ini. Berbicara tentang strategi komunikasi berarti berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan tepat. Perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tidak mungkin dielakkan (Syarif, 2011:28).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti ingin mendeskripsikan komponen strategi komunikasi apa saja yang telah dikembangkan dan digunakan



oleh Dishubkominfo Kab. Banjar baik di internal maupun ke eksternal organisasinya, serta untuk melihat hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan strategi komunikasi ini.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana komponen strategi komunikasi internal dan eksternal yang dikembangkan dan digunakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar dalam memperoleh Penghargaan Wahana Tata Nugraha ?
2. Hambatan-Hambatan komunikasi internal dan eksternal apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan strategi komunikasi Dishubkominfo Kab. Banjar dalam memperoleh WTN ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan komponen Strategi Komunikasi internal dan eksternal yang dikembangkan dan digunakan oleh Dishubkominfo Kab. Banjar dalam memperoleh Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan komunikasi internal dan eksternal apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan strategi komunikasi Dishubkominfo Kab. Banjar dalam memperoleh WTN.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Terkait tujuan yang ingin dicapai diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat :

##### 1. Manfaat Teoritis

Yaitu sebagai salah satu sarana pembandingan bagi Ilmu Pengetahuan secara umum dan secara khusus bagi civitas akademika Universitas Airlangga untuk memperkaya informasi mengenai strategi komunikasi sebuah organisasi pemerintah dalam usahanya memperoleh penghargaan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi saran dan masukan yang membangun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar secara umum dan khususnya bagi Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Banjar dalam usaha memperoleh kembali penghargaan Wahana Tata Nugraha, serta dapat menstimulasi Kab/Kota lain untuk berpartisipasi.